

JURNALISME DAMAI DALAM PEMBERITAAN KONFLIK FRONT PEMBELA ISLAM – PEMERINTAH

**(Sebuah Studi Analisis Teks Naratif terhadap Konten Talk Show Mata
Najwa Terkait Insiden Penembakan Enam Anggota Front Pembela Islam)**

Dian Puspita Pakpahan, Ichsan Malik, Djayeng Tirta

Universitas Pertahanan

E-mail: dianpuspita.pakpahan@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan menganalisis penerapan kerangka kerja jurnalisme damai pada tayangan *talk show* Mata Najwa berjudul “Silang Versi FPI – Polisi” dalam menceritakan insiden penembakan enam Laskar FPI. Penelitian dilakukan secara kualitatif melalui analisis teks naratif terhadap struktur, alur, plot, karakter, fungsi, dan nilai. Penelitian menemukan bahwa tayangan Mata Najwa sudah menunjukkan sejumlah karakteristik jurnalisme damai, seperti berfokus pada penderitaan masyarakat, mengajukan penyelesaian masalah melalui cara-cara non kekerasan, dan mengekspos ketidakbenaran dari semua pihak yang bertikai. Meski demikian, di saat yang sama tayangan ini juga menunjukkan sejumlah ciri jurnalisme perang, yakni dengan meminimalisir peran salah satu aktor dalam proses pendefinisian konflik, menghilangkan potongan informasi penting yang dapat memperjelas konteks dan akar permasalahan konflik, serta menyajikan informasi mengenai luka-luka pada tubuh korban secara spekulatif. Tayangan ini menawarkan resolusi konflik berupa penegakan keadilan, penyelesaian masalah tanpa kekerasan, serta penindakan hukum bagi setiap pelaku kekerasan.

Kata Kunci: analisis teks naratif, berita, konflik, Front Pembela Islam, jurnalisme damai.

PENDAHULUAN

Perdamaian erat kaitannya dengan proses komunikasi. Komunikasi mampu menciptakan kesadaran akan adanya potensi konflik serta mendorong terbentuknya resolusi konflik. Melalui proses komunikasi, masing-masing pihak yang bertikai dapat mengetahui cara pandang pihak lain, sehingga mereka bisa menentukan reaksi lebih lanjut, apakah akan menyelesaikan perbedaan yang ada, atau bersikukuh menyangkal persepsi satu sama lain.

Komunikasi konstruktif merupakan elemen esensial bagi proses perdamaian. Komunikasi konstruktif dimaknai sebagai komunikasi yang dilandasi kejujuran, keterbukaan, dan kesediaan untuk menyesuaikan cara pandang diri/kelompok dengan cara pandang pihak lain. Pola komunikasi semacam ini menitikberatkan

pada upaya akomodasi demi meredakan ketegangan-ketegangan (*tensions*), serta menghindari sikap permusuhan (*hostility*) di antara pihak-pihak yang berkonflik (Lederach & Jenner, 2002).

Peristiwa penembakan terhadap enam anggota organisasi masyarakat (ormas) Front Pembela Islam (FPI) pada tanggal 7 Desember 2020 merupakan salah satu peristiwa yang hingga saat ini menuai sikap pro-kontra masyarakat. Peristiwa ini sempat menjadi tajuk utama di berbagai media elektronik dan cetak dengan interpretasi beragam. Sebagian media, seperti halnya Kompas, menarasikan peristiwa ini sebagai kesalahan FPI yang telah menyerang polisi terlebih dahulu (Bustomi, 2020). Ada pula yang menarasikannya sebagai pelanggaran HAM, serta mempertanyakan keabsahan

prosedur kerja polisi dalam melakukan pengintaian hingga berujung kekerasan.

Jika ditarik ke belakang, peristiwa penembakan enam anggota FPI tidak terlepas dari rangkaian peristiwa sebelumnya yang membentuk wacana mengenai eksistensi FPI dan Habib Rizieq Shihab (HRS). Isu-isu yang mengemuka di antaranya adalah radikalisme, intoleransi, penegakan hukum, dan ketertiban umum. Seringkali digambarkan, FPI merupakan organisasi radikal dan intoleran yang kerap menggunakan cara-cara kekerasan dalam mewujudkan cita-citanya, seperti melakukan aksi *sweeping* dan penyerangan terhadap tempat-tempat hiburan dan aliran agama lain. Sementara itu, FPI mengklaim bahwa organisasinya bertujuan mewujudkan revolusi akhlak mulai dari level bawah (*grassroot*) hingga ke tatanan sosial yang lebih tinggi demi mencegah kesesatan dan kemungkaran.

Meski demikian, eksistensi FPI sebagai pencegah kemungkaran kerap kali digambarkan penuh dengan kekerasan. Sepanjang masa berdirinya, yakni dari tahun 1998-2021, ormas FPI kerap berurusan dengan hukum. Perilaku FPI dianggap mengancam kemanusiaan, ketertiban dan keteraturan sosial, serta menimbulkan ketakutan dan citra negatif terhadap agama Islam (Saifudin, 2011). Ditambah lagi, pemimpin FPI kerap kali tersangkut kasus-kasus hukum dan pernah menyatakan diri sebagai simpatisan *ISIS* (*Islamic State of Iran and Syria*). Pemimpin FPI juga terbukti melakukan penghinaan terhadap etnis tertentu seperti Sunda dan Dayak (Sumaya, 2020). Selain itu, FPI juga pernah terbukti menghina Pancasila sebagai lambang negara dan Presiden sebagai simbol negara. Tindakan-tindakan ini memicu terjadinya konflik vertikal antara FPI dengan pemerintah.

Fenomena FPI pada awalnya dibicarakan pada tatanan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Sikap intoleran, radikal, beserta tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan oleh FPI dinilai meresahkan

masyarakat, akan tetapi belum cukup menjadikannya sebagai ancaman eksistensial bagi negara. Persepsi ini mulai berubah semenjak pemilu presiden di tahun 2019, di mana masyarakat Indonesia terpecah dan berkonflik atas nama pasangan calon tertentu. Persepsi ancaman ini semakin meningkat setelah Habib Rizieq Shihab (HRS) kembali dari Arab Saudi pada 10 November 2020. Penjemputan HRS yang disertai iring-iringan massa dalam jumlah besar dianggap telah melanggar kebijakan pemerintah di masa pandemi mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Kontroversi HRS pun kian menjadi-jadi ketika ia menggelar acara pernikahan anaknya dengan mengundang tamu sebanyak 10.000 orang (Ihsanuddin, 2020).

Peristiwa penembakan enam anggota FPI menandai suatu fase baru dalam konflik antara FPI-Pemerintah. Konflik yang semula berkisar pada intimidasi dan kekerasan verbal tiba-tiba secara akseleratif berubah menjadi kekerasan fisik yang menghilangkan enam nyawa. Peristiwa ini menandai sebuah titik kritis konflik yang mungkin disusul dengan melemahnya dukungan masyarakat terhadap FPI, atau justru memperkuat dukungan tersebut sehingga menimbulkan konflik yang lebih besar, seperti konflik horizontal atau kerusuhan.

Dalam konteks penanganan konflik, media dapat berperan sebagai salah satu infrastruktur perdamaian. Media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi khalayak, serta bisa menggunakan kekuatan itu untuk mendukung proses deeskalasi konflik dan membangun perdamaian. Misalnya, dengan menyebarkan pesan-pesan moral (humanisme) dalam setiap kejadian konflik, atau dengan cara mempraktikkan jurnalisme damai. Kajian jurnalisme damai pada sebuah konflik yang melibatkan pemerintah menarik untuk dikaji, karena melibatkan kepentingan umum dan stabilitas keamanan.

Jurnalisme damai dilakukan dengan cara menceritakan kejadian dengan bingkai

yang lebih luas, berimbang dan akurat, serta didasarkan pada informasi tentang konflik dan perubahan-perubahan yang terjadi (Lynch & McGoldrick, 2005). Kerangka ini seringkali diperhadapkan dengan kerangka jurnalisme perang yang lebih berfokus pada kekerasan, berorientasi pada propaganda, berorientasi pada elit/penguasa, dan berorientasi pada kemenangan (Galtung & Lynch, 2010).

Tabel 1
Perbedaan Kerangka Jurnalisme Damai dan Jurnalisme Perang

Jurnalisme Damai	Jurnalisme Perang
1. Berorientasi pada konflik dan perdamaian • Menjelaskan kronologi pembentukan konflik • Tafsiran terbuka pada ruang, waktu, sejarah, dan budaya setempat • Membuat konflik menjadi transparan • Memberikan suara kepada semua pihak bertikai; menunjukkan empati dan pemahaman • Melihat konflik sebagai masalah yang harus dipecahkan secara kreatif dan non kekerasan • Humanisasi kepada setiap pihak yang terlibat • Proaktif dalam mencegah terjadinya konflik yang lebih besar • Fokus pada dampak kekerasan terhadap trauma individu (luka batin) dan trauma sosial	1. Berorientasi pada perang atau kekerasan • Berfokus pada arena konflik; 2 pihak bertikai, 1 pemenang, dan pemenang mendapatkan semuanya • Ruang dan waktu tertutup; memusatkan perhatian pada siapa yang bersalah dalam konflik • Menyembunyikan fakta • Jurnalisme “us vs. them”; penggalangan dukungan melalui propaganda • Melihat ‘them’ (pihak yang lain) sebagai sumber permasalahan; berfokus pada siapa yang bertahan dalam perang • Dehumanisasi terhadap pihak lawan • Reaktif: menunggu kekerasan terjadi • Berfokus pada dampak yang terlihat, seperti pembunuhan, luka-luka dan kerusakan materiil.
2. Berorientasi pada kebenaran • Mengekspos ketidakbenaran dari semua pihak yang bertikai	2. Berorientasi pada propaganda • Mengekspos ketidakbenaran dari satu pihak dan menyembunyikan kesalahan dari pihak yang lain
3. Berorientasi pada masyarakat • Fokus pada penderitaan masyarakat; wanita, lansia, anak-anak, serta menyuarakan suara korban yang terluput dari perhatian • Menyebut nama pelaku kejahatan dari kedua belah pihak. • Melibatkan tokoh-tokoh perdamaian (<i>peacemakers</i>) dari kalangan masyarakat	3. Berorientasi pada elit atau penguasa • Fokus pada penderitaan satu kelompok tertentu • Melabeli lawan sebagai penjahat; menyebut nama pelaku kejahatan dari salah satu pihak • Fokus pada sekelompok elit sebagai tokoh perdamaian (<i>peacemakers</i>)

4. Berorientasi pada solusi • Berupaya mencari perdamaian tanpa kekerasan • Menginginkan perdamaian dan mencegah terjadinya konflik • Fokus pada struktur dan budaya masyarakat yang damai • Menawarkan upaya-upaya resolusi, rekonsiliasi dan rekonsiliasi pasca terjadinya konflik.	4. Berorientasi pada kemenangan • Memandang perdamaian sebagai sebuah kemenangan dan gencatan senjata • Menyemunyikan inisiatif damai sebelum akhirnya ada pihak yang meraih kemenangan • Berfokus pada perjanjian perdamaian, institusi, dan masyarakat yang terkontrol • Menantikan perang berikutnya yang kembali menyala ketika ada sultan.
--	--

Sumber: Galtung & Lynch (2010)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan meneliti suatu fenomena pada kondisinya yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama (Sugiyono, 2005). Pendekatan kualitatif umumnya dikenal melalui sumbangsih sejumlah mazhab, di antaranya Interaksionisme Simbolik, Mazhab Chicago, Perspektif Batin, Fenomenologi, Telaah Interpretif, Etnometodologis, Ekologis, dan Deskriptif (Alwasilah, 2014). Penelitian-penelitian yang menggunakan pendekatan ini pada hakikatnya bersifat pemahaman (*verstehen*) dan tidak berpretensi untuk mencari suatu bentuk hukum universal, namun lebih memfokuskan pada upaya mencari keunikan atau kekhasan dari suatu fenomena sosial (Lubis, 2016).

Penelitian ini berupaya mencermati teks berita sebagai sebuah fenomena sosial. Metode yang digunakan bersifat deskriptif-kualitatif dengan kerangka analisis teks naratif. Analisis teks naratif adalah sebuah metode untuk mempelajari teks dengan berfokus pada struktur kisah atau narasi (Stokes, 2006:72). Penulis mengembangkan kerangka analisis berdasarkan empat unsur: (1) struktur cerita; (2) alur dan plot; (3) karakter, serta; (4) nilai.

Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan studi dokumentasi dan studi literatur sebagai teknik pengumpulan data. Yang menjadi data primer adalah video

rekaman *talk show* “Silang Versi FPI-Polisi”. Setelah dikumpulkan, data kemudian diolah dalam beberapa tahap: (1) Transformasi data dari bentuk audio-visual ke dalam teks (transkrip pembicaraan); (2) Pencermatan (observasi) teks; (3) Kategorisasi data berdasarkan kerangka analisis (mana yang memuat data tentang struktur narasi, alur cerita, plot, karakter, dst.; (4) Sistemasi temuan ke dalam bentuk tabel; (5) Menginterpretasi data dan menganalisis koherensi (logika bercerita) yang digunakan; (5) Menarik kesimpulan.

Perangkat analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kerangka jurnalisme damai dari Galtung & Lnych yang dipadukan dengan struktur narasi Todorov dan Lacey (2000), Karakter dan Fungsi Vladimir Propp (1965), serta Oposisi Biner Levi Strauss (Eriyanto, 2020). Tiap-tiap dimensi dan karakteristik jurnalisme damai dapat digali melalui pencermatan terhadap unsur-unsur naratif teks. Misalnya saja, dengan mencermati struktur narasi, alur dan plot, karakter, serta nilai yang terkandung dalam sebuah teks, kita dapat mengetahui bagaimana kronologi suatu konflik dijelaskan, bagaimana masing-masing aktor konflik direpresentasikan, dan ada/tidaknya resolusi yang mengajak pada penyelesaian masalah tanpa kekerasan.

Tabel 2
Kerangka Analisis Penelitian

No	Dimensi Analisis	Karakteristik	Unit Analisis
1	Orientasi perdamaian	- Menjelaskan kronologi pembentukan konflik - Tafsiran terbuka pada ruang, waktu, sejarah, dan budaya setempat - Membuat konflik menjadi transparan - Memberikan suara kepada semua pihak bertikai; menunjukkan empati dan pemahaman - Melihat konflik sebagai masalah yang harus dipecahkan secara kreatif dan non kekerasan - Humanisasi kepada setiap pihak yang terlibat - Proaktif dalam mencegah terjadinya konflik yang lebih besar - Fokus pada dampak kekerasan: trauma individu (luka batin) dan trauma sosial	Struktur narasi, karakter, nilai

2	Orientasi kebenaran	Mengekspos ketidakbenaran dari semua pihak yang bertikai	Alur cerita, plot
3	Orientasi masyarakat	- Fokus pada penderitaan masyarakat; wanita, lansia, anak-anak, serta menyuarakan suara korban yang terluput dari perhatian - Menyebut nama pelaku kejahatan dari kedua belah pihak - Melibatkan pandangan tokoh-tokoh perdamaian (<i>peacemakers</i>)	Karakter (tokoh)
4	Orientasi pada penyelesaian masalah	- Berupaya mencari perdamaian tanpa kekerasan - Menginginkan perdamaian dan mencegah terjadinya konflik - Fokus pada struktur dan budaya masyarakat yang damai - Menawarkan upaya-upaya resolusi, rekonstruksi dan rekonsiliasi pasca terjadinya konflik	oposisi biner (<i>binary opposition</i>)

Sumber: Galtung & Lynch (2010) dan Eriyanto (2020)
(dimodifikasi oleh Peneliti)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis diperoleh melalui pencermatan data (teks) menggunakan perangkat analisis. Hasil-hasil tersebut diurai berdasarkan masing-masing unsur naratif, yaitu struktur, alur cerita, plot, karakter dan fungsi, serta nilai-nilai (*values*) yang terdapat pada tayangan “Silang Versi FPI-Polisi”. Selanjutnya, dilakukan interpretasi lebih lanjut, yakni menentukan apakah tayangan “Silang Versi FPI-Polisi” sudah menerapkan kerangka jurnalisme damai atau tidak, serta bagaimana tayangan tersebut memiliki relevansi dengan upaya penyelesaian konflik antara kedua belah pihak.

Struktur Narasi

Narasi Mata Najwa diawali dengan pemaparan kronologi dari pihak FPI. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang orang pertama (yang mengalami peristiwa). Latar belakang peristiwanya dibuat seolah-olah dalam kondisi normal, di mana rombongan FPI hendak bertolak ke Karawang untuk melakukan pengajian.

Apabila dicermati, struktur narasi Mata Najwa menempatkan titik awal cerita (kondisi keseimbangan) pada perjalanan rombongan Habib Rizieq Shihab (HRS) menuju Karawang pada dini hari, 7 Desember 2020. Kemudian, sebertuk

gangguan (*disruption*) muncul. Gangguan itu muncul dalam wujud tiga mobil pengintai. Ketiga mobil tersebut digambarkan terus-menerus berupaya memasuki barisan rombongan FPI untuk mendekati rombongan HRS. Kejar-kejaran pun terus berlangsung hingga akhirnya diikuti dengan kontak fisik, penangkapan, dan penembakan keenam anggota FPI.

Melalui struktur penceritaan semacam ini, Mata Najwa secara tidak langsung menempatkan ketiga mobil pengintai sebagai sumber gangguan/masalah. Logikanya, apabila tidak terjadi pengintaian, maka seluruh narasi hanya akan berkisar seputar kepergian rombongan HRS ke Karawang. Jika para pengintai tidak tiba-tiba muncul, maka tidak akan terjadi peristiwa kekerasan yang mengakibatkan tewasnya enam anggota Laskar FPI. Hal ini tentu akan berbeda jika, misalnya, Mata Najwa mengawali cerita dengan latar belakang kasus-kasus hukum HRS, pemanggilan HRS oleh pihak kepolisian, serta maraknya penggalangan kekuatan demonstrasi untuk membela HRS. Jika hal tersebut dilakukan, proses pengintaian akan menjadi masuk akal dan tidak terkesan anomali, namun jelas konteks permasalahannya.

Dilihat dari aspek penceritaannya, Mata Najwa memang meletakkan peristiwa penembakan enam anggota FPI dalam konteks yang sempit, baik dari segi waktu maupun ruang. Latar waktu yang digunakan kurang lebih 12 hari, mulai dari pengintaian, pertemuan, penembakan, konferensi pers, autopsi, rekonstruksi, dan pembentukan tim peyelidik independen. Mata Najwa tidak membicarakan peristiwa penembakan anggota FPI dalam konteks pelanggaran-pelanggaran hukum HRS. Akibatnya, ada unsur cerita tertentu yang menjadi buram, yakni unsur mengapa (*why*) aparat kepolisian melakukan pengintaian dan pengejaran terhadap HRS. Dalam hal ini, lensa masalah lebih difokuskan pada motivasi dan tindakan kepolisian, khususnya pada ada/tidaknya kesalahan teknis/prosedur polisi dalam melakukan

tindakan pengintaian, pengejaran, dan penembakan.

Alur Cerita dan Plot

Dalam menarasikan peristiwa penembakan enam anggota FPI, Mata Najwa lebih menitikberatkan pada kronologi kejadian. Sementara itu, latar belakang yang menuntun kepada peristiwa tersebut kurang dieksplorasi. Dari tujuh segmen Mata Najwa “Silang Versi FPI-Polisi”, hanya pada segmen ke enam para narasumber membicarakan mengenai riwayat kekerasan FPI. Itu pun hanya digunakan sebagai bagian dari premis dan penarikan kesimpulan bahwa kekerasan FPI di masa lalu tidak boleh dijadikan pembenaran atas tindakan kekerasan aparat kepolisian.

Disadari atau tidak, penempatan rekam jejak kekerasan FPI di segmen akhir menimbulkan beberapa konsekuensi. Pertama, hal tersebut tidak mencemari karakter FPI ketika berperan sebagai pencerita kronologi peristiwa. Seandainya riwayat kekerasan FPI ditampilkan di bagian awal, khalayak mungkin akan terlebih dulu memiliki prejudisme terhadap karakter FPI dan bersikap antipati terhadap cerita yang mereka sampaikan. Ke dua, apabila riwayat kekerasan ini dibahas sejak awal, maka empati khalayak terhadap korban penembakan akan sulit dibangun.

Tayangan “Silang Versi FPI-Polisi” menunjukkan sikap empati kepada FPI. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan FPI kesempatan untuk menjadi pencerita kronologi kejadian, memperdengarkan rekaman detik-detik penembakan, menampilkan nama-nama dan profil korban penembakan, serta membahas luka-luka pada jenasah keenam anggota FPI. Dengan memasukkan unsur-unsur dramatis, Mata Najwa menghadirkan buruknya potret kekerasan serta pentingnya berempati terhadap korban kekerasan.

Karakter dan Fungsi

Keseluruhan narasi “Silang Versi FPI-Polisi” melibatkan 31 karakter. Dua di

antaranya, yakni keenam korban tewas dan aparat pelaku penembakan, dimunculkan sebagai karakter-karakter bisu (pasif). Eksistensi mereka di dalam cerita sebatas dijelaskan atau didefinisikan oleh karakter-karakter lain. Dikarenakan keduanya merupakan tokoh-tokoh utama yang terlibat secara langsung dengan peristiwa, maka representasi keduanya di dalam cerita penting untuk dicermati.

Berdasarkan hasil analisis teks, FPI mengkarakterisasi keenam korban tewas sebagai pasukan pelindung para ulama, ustad, atau kyai. Keenam korban tewas digambarkan sebagai sosok tak bersenjata, baik itu senjata tajam, api, ataupun peledak. Keberadaan Laskar FPI dijustifikasi sebagai akibat dari banyaknya insiden-insiden di masa lalu yang menghilangkan nyawa ulama. Di sisi lain, kepolisian menggambarkan keenam Laskar FPI yang tewas sebagai sosok yang bersenjata api dan bersenjata tajam. Mereka dianggap memprovokasi aparat dengan cara menabrak mobil polisi dan memberi perlawanan saat diberikan tembakan peringatan.

Seperti halnya keenam korban tewas, kepolisian pun direpresentasikan secara pro dan kontra di dalam teks. Di satu sisi, pihak aparat menggambarkan dirinya sebagai sosok yang sedang menjalankan tugas, yang kemudian berhadapan dengan situasi berbahaya dan terpaksa mengeluarkan tembakan. Hal ini berseberangan dengan pandangan FPI yang menggambarkan aparat (para pengintai) sebagai sosok yang rancu, yang tidak jelas siapa dan apa motif tindakannya. Keabsahan prosedur kerjanya pun dipertanyakan, terlebih oleh Munarman (FPI) dan Fatia Maulidiyanti (perwakilan KontraS).

Perlu digarisbawahi, siaran Mata Najwa tidak menghadirkan aparat kepolisian ke dalam *talk show* secara langsung. Tayangan ini menggunakan dokumentasi pemberitaan dari sejumlah media massa untuk mewakili pernyataan polisi. Akibatnya, pihak kepolisian tidak dapat menyanggah atau membalas komentar-komentar yang

disampaikan FPI, Komnas HAM dan KontraS, atau menentukan jalannya arah pembicaraan. Posisi aparat polisi berubah dari subjek pelaku menjadi objek telaahan, yang tindakan-tindakannya dinilai dan dievaluasi oleh tokoh-tokoh lain.

“Silang Versi FPI-Polisi” memberikan suara kepada keluarga korban. Tayangan ini menyoroti keluarga korban yang menderita akibat kehilangan sanak saudaranya secara tidak wajar. Najwa Shihab sempat memperlihatkan foro-foto hasil autopsi para korban dan membahas luka-luka pada tubuh mereka. Hal ini menimbulkan efek dramatisasi dan menghadirkan rasa takut (horor) di benak para penonton. Imaji kekerasan digambarkan dalam wajahnya yang paling buruk, yakni melalui potret kematian seseorang.

Meski demikian, penayangan dan pembahasan luka-luka pada tubuh korban bisa dikatakan subjektif dan spekulatif. Hal ini dikarenakan pembahasan luka-luka tersebut tidak berbasis simpulan pakar forensik, namun berdasarkan penglihatan kasat mata pihak redaksi. Ditambah lagi, deskripsinya bertentangan dengan hasil otopsi Bareskrim POLRI yang menyatakan tidak ada tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban. Dengan melakukan hal tersebut, di satu sisi Mata Najwa berhasil menampilkan sisi kemanusiaan dan tidak mendehumanisasi para korban; tayangan ini menyebutkan nama-nama korban, memasang wajah mereka, dan meminta keluarga terdekat untuk menceritakan kehidupan pribadi para korban. Akibatnya, khalayak diminta berempati dan menempatkan diri pada posisi korban maupun keluarga korban. Meski demikian, eksplorasi terhadap penderitaan korban mengandung informasi spekulatif yang mampu menimbulkan provokasi. Tanpa merujuk pada ahli forensik manapun, tayangan ini membahas luka-luka pada jenazah keenam Laskar FPI. Hal ini dapat memperkuat dugaan masyarakat mengenai adanya penyiksaan terhadap para korban, serta memperkuat rasa tidak percaya

masyarakat kepada aparat polisi/pemerintah.

Narasi “Silang Versi FPI-Polisi” tidak mendikotomikan FPI dan Polisi sebagai pahlawan vs. penjahat. Keduanya diatribusi dengan sifat-sifat negatif, dan keduanya dikatakan memiliki riwayat kekerasan. Dengan berbuat demikian, Mata Najwa menempatkan aparat kepolisian sebagai sosok yang tidak heroik, namun sama-sama sebagai pelaku kekerasan.

Nilai-Nilai (*Values*)

Narasi berkaitan dengan tata nilai. Sebuah narasi selalu berupaya memperhadapkan realitas dengan sistem nilai yang diyakini. Jessica Senehi menyatakan, narasi memiliki kekuatan tekanan moral (*moral pressure*), yang bertujuan menaklukkan subjeknya agar mengikuti tatanan nilai yang ditawarkan (Sandole *et al.*, 2009). Nilai-nilai dalam sebuah narasi dapat diketahui melalui analisis tekstual terhadap struktur cerita, alur dan plot, penggambaran karakter (karakterisasi), dan oposisi biner (Eriyanto, 2020).

Tayangan “Silang Versi FPI-Polisi” menggunakan oposisi biner untuk mengkontraskan FPI dengan aparat/pemerintah. Keduanya senantiasa diletakkan dalam relasi bertentangan. Menurut Munarman, gerakan FPI merupakan sebuah respon atas praktik ketidakadilan dalam masyarakat. Ketidakadilan tersebut coba dilawan oleh FPI, namun kemudian dibalas pemerintah melalui cara-cara kekerasan struktural dan kekerasan fisik. Dengan demikian, relasi antara FPI dengan pemerintah ditempatkan sebagai sebuah oposisi, yakni antara penentang ketidakadilan vs. pelaku ketidakadilan.

Relasi oposisi juga tampak melalui pernyataan Fatia (Kontras). Menurutnya, baik FPI maupun aparat kepolisian sama-sama memiliki catatan panjang kekerasan terhadap masyarakat. Hanya saja, kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian tidak pernah berujung kejelasan.

Dengan demikian, relasi antara FPI-Pemerintah kembali berada dalam kondisi oposisi, di mana aparat kepolisian dipotretkan sebagai pelaku kekerasan yang tidak pernah dihukum, sementara FPI telah menanggung hukuman atas tindakan-tindakan kekerasannya.

Relasi oposisi juga tampil dalam pernyataan Najwa Shihab. Ia menyatakan bahwa pemerintah telah bersikap pandang bulu dalam menindak pelaku ujaran kebencian dan kekerasan. Menurutnya, dalam beberapa kasus pemerintah justru berkongsi dengan para pelaku ujaran kebencian, yakni ketika keduanya memiliki persamaan kepentingan. Secara implisit, tayangan ini meminta agar setiap pelaku kekerasan harus diadili, termasuk aparat kepolisian.

Jurnalisme Damai dalam Tayangan “Silang Versi FPI-Polisi”

Dalam sebuah pemberitaan konflik, penerapan kerangka kerja jurnalisme damai dapat diketahui berdasarkan ciri-ciri yang terdapat di dalam teks. Berita-berita yang disusun melalui kerangka jurnalisme damai senantiasa menunjukkan orientasi pada perdamaian, kebenaran, masyarakat, dan penyelesaian masalah (Galtung & Lynch, 2010). Melalui kerangka jurnalisme damai, media massa dapat memainkan peran dalam mende eskalasi konflik atau memediasi para aktor konflik.

Dalam memberitakan peristiwa penembakan enam anggota FPI, tayangan “Silang Versi FPI-Polisi” menggunakan konteks ruang, waktu, dan sejarah yang terbatas. Fokus pembahasan diletakkan pada kronologi penembakan dan bukan kronologi konflik. Akibatnya, usulan penyelesaian masalah lebih berfokus pada upaya penegakan hukum dan bukan pada penyelesaian akar konflik. Padahal, konflik antara FPI dengan pemerintah tidak terbentuk dalam waktu singkat, namun telah berlangsung lama, dengan akar konflik yang belum pernah dibahas dan diselesaikan secara bersama-sama.

Dari segi substansi informasi, “Silang Versi FPI-Polisi” melupakan perhatian khalayak dari kasus-kasus hukum Habib Rizieq Shihab (HRS). Peristiwa penembakan enam Laskar FPI dilihat secara otonom (terpisah) dari peristiwa-peristiwa pendahulu yang menuntun pada pengintaian HRS. Padahal, peristiwa tersebut tidak terlepas dari rentetan peristiwa sebelumnya ketika HRS berulang kali melakukan pelanggaran hukum dan mangkir dari panggilan kepolisian. Pada tayangan tersebut, sosok aparat lebih dipotretkan sebagai pembawa gangguan (*disruption*) yang aksi-aksinya dipertanyakan dari segi tujuan maupun keabsahan prosedural. Dengan mengaburkan potongan informasi penting tentang kasus-kasus hukum HRS, latar belakang kejadian dan konteks permasalahan menjadi kurang jelas. Informasi yang disajikan menjadi tidak sepenuhnya benar.

Dalam menarasikan peristiwa penembakan enam Laskar FPI, Mata Najwa memberikan suara kepada semua pihak yang bertikai. Pihak FPI dan polisi berkesempatan untuk menjelaskan sudut pandang mereka masing-masing. Selain itu, tayangan ini juga membahas peristiwa penembakan dalam konteks isu kekerasan, dan secara proaktif mengajak masyarakat untuk menyelesaikan masalah tanpa cara-cara kekerasan. Meski begitu, tayangan ini cenderung menempatkan aparat pemerintah dalam posisi bersalah dan memberi lebih banyak keleluasaan kepada FPI untuk mengarahkan narasi peristiwa. Di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sedang terbelah dan kelompok masyarakat tertentu yang reaktif dan emosional, hal ini mampu memicu terjadinya eskalasi konflik. Hal ini bisa memperbesar tingkat ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah.

Dari segi orientasi pada kebenaran, “Silang Versi FPI-Polisi” berupaya mengekspos ketidakbenaran dari semua pihak yang bertikai. Pihak aparat kepolisian dianggap bersalah dari segi prosedural, dan

dinilai memiliki sejumlah catatan sejarah kekerasan kepada masyarakat. Dalam beberapa kali kesempatan, kepolisian justru dianggap pernah berkongsi dengan FPI dan membiarkan organisasi tersebut menjalankan aksi-aksinya dalam masyarakat. Selain menyinggung kesalahan-kesalahan (*falsehood*) dari pihak polisi, Mata Najwa juga menyebutkan sejumlah catatan kekerasan dari pihak FPI. Beberapa di antaranya menyangkut kekerasan terhadap aparat, negara, dan masyarakat, serta keterlibatannya dengan jaringan terorisme internasional. Najwa Shihab menilai, kedua belah pihak sama-sama merupakan pelaku kekerasan, dan sebagai konsekuensinya, aparat polisi pun harus dihukum jika melakukan tindak kekerasan.

Tayangan “Silang Versi FPI-Polisi” menghadirkan aktor-aktor konflik secara luas, mulai dari keluarga korban tewas, perwakilan FPI, perwakilan Kompolnas, perwakilan Komisi III DPR, perwakilan KontraS, perwakilan Komnas HAM, dan politikus PDI-P. Pada salah satu segmen, Najwa Shihab menampilkan secara khusus foto-foto autopsi jenazah keenam Laskar FPI dan membahas luka-luka yang terdapat pada tubuh mereka. Adegan ini dibuat dengan penuh dramatisasi sehingga menimbulkan efek horor ke dalam benak khalayak. Citra (*image*) yang muncul adalah mengenai buruknya potret kekerasan, serta dampak traumatisnya terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat. Najwa Shihab bukan sekedar menyebutkan nama-nama korban tewas, namun juga menampilkan kehidupan pribadi mereka. Ia melakukan komunikasi empatik dengan menekankan bahwa korban tewas bukanlah objek, melainkan manusia yang memiliki wajah, nama, dan cerita.

Dalam menerapkan jurnalisme damai, sebuah pemberitaan harus selalu menyertakan penyelesaian masalah atau resolusi konflik. Resolusi ini disampaikan dengan dilandasi nilai-nilai dan norma-norma tertentu mengenai apa yang baik/buruk, dan apa yang benar/salah. Pada

tayangan Mata Najwa, nilai-nilai yang disampaikan adalah keadilan (*justice*), non kekerasan (*non violence*), empati, dan konsistensi dalam hal penegakan hukum. Nilai-nilai ini menuntun pada serangkaian resolusi konflik yang menginginkan terciptanya keadilan dalam bernegara dan bermasyarakat, penghentian segala bentuk tindakan kekerasan, serta perlunya konsistensi pemerintah dalam menindak para pelaku kekerasan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa tayangan “Silang Versi FPI-Polisi” telah menunjukkan sejumlah karakteristik jurnalisme damai, seperti berfokus pada penderitaan masyarakat, mengajukan penyelesaian masalah melalui cara-cara non kekerasan, dan mengekspos ketidakbenaran (*falseness*) dari semua pihak yang bertikai. Meski demikian, di saat yang sama tayangan ini masih menunjukkan sejumlah karakteristik jurnalistik perang, yakni dengan meminimalisir peran aktif salah satu aktor dalam proses pendefinisian konflik, menghilangkan potongan informasi penting yang dapat memperjelas konteks dan akar permasalahan, serta menyajikan informasi mengenai luka-luka pada tubuh korban tewas secara spekulatif. Di dalamnya, konflik antara FPI-Pemerintah diceritakan dalam konteks ruang dan waktu yang sempit. Fokus pembahasan diletakkan pada detil kronologi penembakan, dan bukan pada kronologi konflik.

Resolusi konflik yang ditawarkan dalam tayangan ini adalah penegakan keadilan (*justice*), penyelesaian masalah tanpa kekerasan (*non violence*), dan konsistensi penindakan hukum bagi setiap pelaku kekerasan. Secara normatif, resolusi-resolusi ini memiliki relevansi dengan kondisi publik yang sedang terbelah dan merindukan suatu pemberitaan yang berimbang (*impartial*). Meski demikian, isu gangguan keamanan yang ditimbulkan perilaku FPI kurang mendapat sorotan.

Akibatnya, FPI digambarkan sebagai korban, dan aparat/pemerintah ditempatkan sebagai pihak bersalah, yakni dengan melakukan kesalahan prosedural dan unjuk kekuatan berlebih (*excessive force*).

Berdasarkan simpulan-simpulan di atas, Penulis menawarkan beberapa saran/rekomendasi. *Pertama*, perlu lebih banyak studi jurnalisme damai yang membahas konflik-konflik vertikal dan melibatkan isu keamanan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi kajian jurnalisme damai ketika harus memperhadapkan hak asasi manusia dengan gangguan/ancaman keamanan. *Kedua*, perlu lebih banyak penelitian jurnalisme damai dengan menggunakan kerangka analisis teks naratif. Analisis teks naratif mampu mengungkap tujuan dan nilai-nilai intrinsik di dalam sebuah teks/percakapan yang mungkin terluput dari analisis teks berpendekatan lainnya. *Ketiga*, dalam hal pemberitaan peristiwa yang berisiko menimbulkan eskalasi konflik, media perlu melakukan pengecekan ulang terhadap kontennya sehingga jauh dari unsur-unsur subjektif atau provokatif yang dapat menimbulkan frustrasi massa. *Keempat*, kajian jurnalisme damai perlu dilengkapi dengan studi fenomenologi guna menganalisis kerangka berpikir wartawan ketika meliput dan merangkai fakta berita, serta telaah media sebagai sebuah organisasi yang menerapkan kebijakan editorial tertentu. Penelitian ini juga bisa ditindaklanjuti dengan studi konsensus, di mana media, sebagai bagian dari institusi demokrasi, mampu mendorong terbentuknya konsensus mengenai suatu isu sosial yang mengemuka dalam masyarakat. Hal ini penting mengingat pemberitaan-pemberitaan mengenai FPI turut menentukan langkah pemerintah selanjutnya ketika melakukan pembubaran terhadap FPI.

DAFTAR PUSTAKA

Alwasilah, Chaedar. (2008). *Pokoknya Kualitatif: Dasar-Dasar Merancang*

- dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- BBC News Indonesia. (2020). *Mengapa Negara Dituding Sering Gamang Menyikapi FPI dan Rizieq Shihab*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-55316266>, tanggal 14 Februari 2022, pukul 06:00 WIB.
- Bustomi, Muhammad Isa. (2020). *Serang Polisi, 6 Orang Simpatisan Rizieq Shihab Tewas Ditembak di Tol*. Jakarta: Kompas.com. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/07/13325341/serang-polisi-6-orang-simpatisan-rizieq-shihab-tewas-ditembak-di-tol?page=all> tanggal 29 Januari 2020 pukul 09:50 WIB.
- Eriyanto. (2020). *Analisis Naratif*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Galtung, Johan dan Lynch J. (2010). *Reporting Conflict: New Directions in Peace Journalism*. St. Lucia, Australia: University of Queensland Press.
- Faisal, Abdul. (2020). *Mata Najwa Jadi Talk Show Berita Terbaik dalam Anugerah KPI 2020*. Jakarta: antaranews.com. Diakses dari www.antaranews.com/berita/1888708/mata-najwa-jadi-talkshow-berita-terbaik-dalam-anugerah-kpi-2020, tanggal 28 Januari 2021 pukul 11:43 WIB.
- Ihsanuddin. (2020). *10.000 Tamu Resepsi Putri Rizieq Shihab di Tengah Pandemi yang Difasilitasi Negara*. Jakarta: Kompas.com. Diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/15/09155741/10000-tamu-resepsi-putri-rizieq-shihab-di-tengah-pandemi-yang?page=all>, tanggal 14 Februari 2020, pukul 09:32 WIB.
- Ibrahim, Igman. (2020). *Bantah Mahfud MD, FPI Tegaskan Penegakan Hukum Kepada Habib Rizieq Adalah Kriminalisasi Ulama*. Diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/25/bantah-mahfud-md-fpi-tegaskan-penegakan-hukum-kepada-habib-rizieq-adalah-kriminalisasi>-
- ulama, tanggal 24 Februari 2021, pukul 13:14 WIB.
- Nathaniel, Felix. (2020). *Meski Kerap Lakukan Kekerasan, Negara dan Para Elit Tetap Sayang FPI*. Diakses dari <https://tirto.id/meski-kerap-lakukan-kekerasan-negara-para-elite-tetap-sayang-fpi-f8lk>, tanggal 11 Februari 2022, pukul 02:19 WIB.
- Lederach, John Paul dan J.M. Jenner. (2002). *A Handbook of International Peacebuilding: Into the Eye of the Storm*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Lynch, Jake dan Annabel McGoldrick. (2005). *Peace Journalism*. Stroud: Hawthorn Press.
- Lubis, Akhyar Yusuf. (2016). *Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Sandole, Dennis J.D., Sean Byrne, Ingrid Sandole-Staroste, dan Jessica Senehi. (2009). *Handbook of Conflict Analysis and Resolution*. Routledge Taylor and Francis Group
- Saifudin. (2011). *Kekerasan Atas Nama Tuhan: Studi Kasus Kekerasan FPI Yogyakarta*. Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Volume 1, No. 1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaya, Faraz. (2020). *Identitas dalam Konflik di Kalimantan Barat (Sebuah Pemetaan Konflik)*. Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik, 2(2), 86-92. DOI: 10.24198/jkrk.v2i2.28149
- Stokes, Jane. (2006). *How to Do Media and Cultural Studies*. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka